

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak perang dunia dimulai hingga saat ini isu keamanan masih menduduki peringkat utama kepentingan nasional negara di dunia. Ancaman keamanan tidak hanya datang dari luar namun juga dari dalam suatu negara, negara menghadapi ancaman dari berbagai arah mulai dari ranah internasional, regional bahkan nasional. Sebagai aktor tunggal, negara sering kali tidak mampu menangani ancaman seorang diri, hal ini tidak lepas dari kurang dan lemahnya kekuatan yang dimiliki suatu negara maka ia membutuhkan bantuan negara lain untuk bertahan dan melindungi kepentingannya, dari sinilah hubungan kerja sama antarnegara tercipta. Hubungan kerja sama lahir dari adanya kesepahaman yang sama antar dua negara mengenai suatu hal sehingga terjalinlah kerja sama agar dapat menguntungkan kedua belah pihak. Hubungan kerja sama dapat dilakukan oleh semua negara, tak terkecuali negara dengan kekuatan yang besar seperti Amerika Serikat.

Amerika Serikat sebagai negara *super power* tidak terlepas dari ikatan hubungan dengan negara lain. Amerika Serikat banyak digandrungi sebagai pasangan dalam menjalin kerja sama oleh negara lain karena kekuatan yang dimilikinya. Dalam sektor militer misalnya, Amerika Serikat berhasil menduduki posisi tertinggi dunia dengan kekuatan militer paling tangguh dan tersebar di seluruh penjuru dunia. Amerika bahkan menjadi satu-satunya negara di dunia yang memiliki basis militer yang tersebar di lima benua (Engelhardt, 2017). Kedudukan militer Amerika sejalan dengan kekuatan ekonomi negara tersebut, Amerika menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar dunia, hal ini membuatnya mampu mempengaruhi dunia dan mampu menekan negara-negara yang mencoba melawannya (Ramli, 2021). Dalam menjalin hubungan internasional, Amerika tentu mencari keuntungan dari interaksinya dengan negara lain, terlebih dengan kekuatan

dan status *super power* yang dimiliki, bukan tidak mungkin Negeri Paman Sam menginginkan keuntungan besar dari kerja sama yang terjalin. Salah satu negara yang menjalin kerja sama dengan Amerika Serikat adalah Arab Saudi.

Arab Saudi sebagai negara yang berada di Kawasan Timur Tengah yang dipenuhi konflik membuatnya lebih rentan terhadap ancaman. Ancaman bagi Arab Saudi tidak hanya datang dari konflik negara lain, namun juga dari ancaman kelompok radikal di tanah Arab. Ancaman-ancaman ini mendorong Arab Saudi untuk mencari perlindungan dan melakukan kerja sama bidang keamanan dengan negara lain. Amerika Serikat kemudian menjadi pilihan Arab Saudi untuk menjalankan kerja sama demi kepentingan keamanannya.

Kerja sama keamanan antara Amerika Serikat dan Arab Saudi telah berlangsung sejak lama, tepatnya setelah ditandatanganinya Perjanjian Bantuan Pertahanan Bersama (*Mutual Defense Assistance Agreement*) tahun 1951 yang mana merupakan perjanjian awal hubungan kedua negara (Metz, 1992). Melalui perjanjian ini Amerika Serikat telah berkomitmen untuk memasok senjata serta melakukan pelatihan militer untuk Arab Saudi. Dalam perjalanannya, suplai senjata Amerika Serikat ke Arab Saudi yang menjadi komponen utama kerja sama keamanan kedua negara tidak selalu berjalan mulus, kebijakan penjualan senjata beberapa kali mendapat kendala baik dari dalam maupun dari luar publik Amerika Serikat. Dalam ranah domestik, penjualan senjata beberapa kali dibatalkan oleh kongres dengan berbagai alasan mulai dari ketakutan akan penyerangan Saudi ke kolega Amerika hingga pelanggaran HAM yang dilakukan kerajaan Saudi (Pollack, 2002). Sementara di sisi lain, penjualan senjata Amerika Serikat beberapa kali mendapat kecaman dari dunia internasional karena dianggap bertentangan dengan hukum internasional, kebijakan ini juga dinilai telah menciptakan pelanggaran HAM yang berujung pada perpecahan dan konflik di dunia (VOA, 2007) .

Selain karena penjualan senjata, hubungan Amerika Serikat dan Arab Saudi juga beberapa kali diterpa gelombang pasang surut akibat konflik lain seperti serangan 9/11 serta berbagai kekecewaan yang Saudi dapatkan atas kebijakan yang diambil pemerintah Amerika Serikat. Terlepas dari gejolak yang terjadi antara kedua negara, di bawah kepemimpinan Trump hubungan kedua negara kembali membaik. Di bawah pimpinan presiden Amerika yang terkenal kontroversial tersebut terjadi upaya pengaturan ulang hubungan Amerika Serikat dan Arab Saudi yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan kedua negara, upaya ini berhasil menciptakan hubungan mulus antara Amerika dan Saudi, keduanya bahkan dikatakan memiliki hubungan yang istimewa. Di awal kepemimpinannya, Trump bahkan menjadikan Arab Saudi sebagai negara asing pertama yang ia kunjungi setelah resmi menjabat sebagai presiden Amerika Serikat, kunjungan ini menjadi angin segar bagi Saudi setelah sebelumnya dikecewakan oleh Obama. Di bawah kepemimpinannya, Trump melanjutkan kerja sama keamanan dengan Arab Saudi termasuk di dalamnya persetujuan suplai senjata ke kerajaan. Keputusan ekspor senjata tetap diambil Trump meskipun kebijakan ini telah mendapat kecaman dari berbagai pihak.

Tulisan ini kemudian mencoba menganalisis alasan Donald Trump melanjutkan kerja sama keamanan dengan Arab Saudi termasuk di antaranya menjual perlengkapan militer ke kerajaan tersebut, selanjutnya akan diketahui kepentingan apa yang hendak dicapai Amerika dalam kerja sama ini. Selain itu tulisan ini juga akan menjelaskan keadaan ekonomi Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Trump, yakni dari tahun 2017 hingga tahun 2021.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

“Mengapa Amerika Serikat menjalin kerja sama dalam bidang keamanan dengan Arab Saudi pada masa kepemimpinan Trump?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendeskripsikan kepentingan Amerika Serikat dalam hubungan kerja sama bidang keamanan dengan Arab Saudi.

D. Kerangka Teori

Dalam skripsi ini penulis menggunakan Teori Kerja Sama Internasional dan Konsep Kepentingan Nasional yang dianggap cocok untuk menganalisis kerja sama Amerika Serikat dan Arab Saudi dalam bidang keamanan.

1. Teori Kerja Sama Internasional

Negara sebagai aktor dalam dunia internasional digambarkan selayaknya manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan bantuan manusia lain dalam menjalankan kehidupannya. Kebutuhan inilah yang kemudian menciptakan terjadinya hubungan antara negara. Salah satu bentuk hubungan yang terjadi adalah hubungan kerja sama internasional.

Kerja sama lahir dari adanya komitmen individu terhadap kesejahteraan bersama atau sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Fokus utama teori kerja sama adalah pemenuhan kepentingan pribadi, dimana hasil yang menguntungkan kedua belah pihak didapatkan melalui kerja sama, bukan dengan cara sendiri ataupun berkompetisi untuk memenuhi kepentingan pribadi (Dougherty & Pfaltzgraff, 1997).

Menurut Kalevi Jaakko Holsti, kerja sama atau kolaborasi lahir dari perpaduan keanekaragaman masalah nasional, regional, atau global yang muncul sehingga dibutuhkan perhatian lebih dari satu negara, yang mana selanjutnya masing-masing pemerintah membawa usulan

atas masalah yang dihadapi, mendiskusikan masalah, menyimpulkan bukti-bukti teknis untuk membenarkan suatu usul, dan mengakhiri perundingan dengan suatu perjanjian yang menguntungkan semua pihak. Holsti menjelaskan kerja sama dalam berbagai definisi, di antaranya kerja sama diartikan sebagai pandangan bahwa terdapat dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan yang saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak (Holsti, 1967).

Adanya hubungan saling ketergantungan antara aktor internasional, serta perubahan kehidupan manusia yang menjadi semakin kompleks, ditambah dengan tidak meratanya sumber daya yang dibutuhkan menjadikan kerja sama internasional sebagai suatu kewajiban yang tidak dapat dihindari oleh negara. Dalam suatu kerja sama internasional terdapat berbagai kepentingan nasional dari negara-negara berbeda yang tidak dapat dipenuhi di dalam negaranya sendiri. Lebih jelasnya, K.J Holsti memaparkan beberapa alasan umum yang melatarbelakangi negara melakukan kerja sama dengan negara lain, yaitu:

1. Kerja sama dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Dikatakan bahwa negara melakukan kerja sama dengan negara lain agar dapat mengurangi biaya produksi yang harus ditanggung dalam memenuhi kebutuhan produk untuk rakyatnya dikarenakan adanya keterbatasan dari negara tersebut.
2. Kerja sama dilakukan untuk meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan pemenuhan bahan baku produksi yang didapat dari negara lain.
3. Kerja sama dilakukan karena adanya permasalahan yang mengancam keamanan bersama.
4. Kerja sama dilakukan sebagai bentuk pengurangan terhadap kerugian negatif yang timbul akibat

tindakan individual negara dimana kerugian negatif tersebut akan berdampak terhadap negara lain (Holsti, 1967).

Terdapat tiga tingkatan dalam kerja sama internasional, yaitu:

1. Konsensus, merupakan tingkatan kerja sama yang ditandai dengan sejumlah ketidakhiruan kepentingan di antara negara-negara yang terlibat dan tanpa keterlibatan yang tinggi di antara negara-negara yang terlibat.
2. Kolaborasi, merupakan tingkatan kerja sama yang lebih tinggi dari konsensus. Tingkatan ini ditandai dengan sejumlah besar kesamaan tujuan, saling kerja sama yang aktif di antara negara-negara yang menjalin hubungan kerja sama dalam memenuhi kepentingan masing-masing.
3. Integrasi, merupakan tingkatan kerja sama yang ditandai dengan adanya kedekatan dan keharmonisan yang sangat tinggi di antara negara-negara yang terlibat. Dalam tingkatan kerja sama ini jarang sekali terjadi benturan kepentingan antara negara-negara yang terlibat (Smith & Hocking, 1990).

Dalam kasus ini kerja sama internasional dimanfaatkan Amerika Serikat untuk mengait Arab Saudi khususnya dalam bidang keamanan untuk memenuhi kebutuhan kedua belah pihak yang berbeda. Salah satu komponen kerja sama keamanan antara keduanya adalah melakukan penjualan perlengkapan militer Amerika Serikat kepada Arab Saudi. Di satu sisi penjualan ini memberikan Amerika keuntungan ekonomi, sementara di sisi lain Arab Saudi diuntungkan dengan pemenuhan kebutuhan kemananannya. Kedua negara yang saling bergantung sepakat untuk melakukan kerja sama dengan tujuan untuk mencapai kepentingan masing-masing negara yang tidak dapat tercapai dari dalam negaranya sendiri.

2. Konsep Kepentingan Nasional

Konsep kepentingan nasional saat ini masih menjadi salah satu fokus utama dalam studi hubungan internasional. Konsep ini berfungsi sebagai *key explanatory tool* dalam memahami dan menjelaskan berbagai fenomena dalam dunia hubungan internasional, terutama dalam bidang diplomasi dan politik luar negeri. Umumnya konsep ini digunakan sebagai konsep dasar untuk menjelaskan perilaku negara dalam politik internasional.

Bukan hanya menjadi konsep yang umum, kepentingan nasional juga merupakan unsur yang menjadi kebutuhan vital bagi negara. Unsur tersebut mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi (Plano & Olton, 1982). Menurut Donald E. Nuchterlein, sederhananya kepentingan nasional dapat diartikan sebagai kepekaan dalam mengetahui kebutuhannya dari suatu negara yang berdaulat dimana kebutuhan tersebut terdapat dalam ruang negara lain dan di luar lingkungan negara tersebut (Nuchterlein, 1976). Nuchterlein membagi kepentingan nasional ke dalam empat kepentingan dasar, yaitu:

1. Kepentingan Pertahanan. Kepentingan nasional suatu negara bertujuan untuk melindungi kedaulatan negara beserta rakyatnya dari semua ancaman yang berasal dari pihak luar. Bentuk ancaman dalam konteks ini ialah ancaman kekerasan fisik (*physical violence*).
2. Kepentingan Ekonomi. Kepentingan nasional yang bertujuan sebagai upaya peningkatan kapabilitas ekonomi negara, yang mana hal tersebut secara tidak langsung mempengaruhi cara negara menjalin hubungan dengan negara lain.
3. Kepentingan Tatanan Dunia. Kepentingan nasional yang bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem

politik dan ekonomi internasional, hal ini dapat berujung pada keamanan dan kenyamanan negara dalam ranah domestik, karena ketika keamanan dicapai maka rakyat dapat terbebas dari ancaman. Dalam hal ini kepentingan negara dapat menyesuaikan dengan kepentingan dunia internasional.

4. **Kepentingan Ideologi.** Kepentingan nasional yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dalam suatu negara. Dalam hal ini nilai-nilai tersebut dapat berupa agama, kepercayaan, ideologi, norma, dan nilai-nilai keluhuran yang dianggap baik oleh masyarakat dalam negara tersebut (Nuchterlein, 1976).

Menurut Warsito (1998), kepentingan nasional suatu negara timbul akibat terbatasnya sumber daya nasional atau kekuatan nasional, sehingga negara-bangsa merasa perlu untuk mencari pemenuhan kepentingan nasional keluar dari batas-batas negaranya. Dari konsep tersebut kemudian dapat dipahami bahwa kepentingan nasional menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku dan mendorong negara untuk mengeluarkan kebijakan luar negeri sebagai upaya untuk mencapai kepentingan tersebut.

Dalam pembahasan ini maka kepentingan nasional lah yang melatarbelakangi Amerika Serikat menjalin kerja sama keamanan dengan Arab Saudi. Amerika melihat Saudi sebagai kawasan yang menjanjikan untuk dijadikan pasar atas perlengkapan militernya, hal ini sudah tentu didasarkan oleh posisi geografis Arab Saudi yang dikelilingi negara berkonflik dan ancaman dari kelompok radikal sehingga membuat Arab Saudi harus memperkuat kekuatan militer. Maka Amerika Serikat melakukan kerja sama dengan Arab Saudi untuk memenuhi kepentingan ekonominya.

E. Hipotesis

Adanya kepentingan Trump untuk menjual perlengkapan militer ke Arab Saudi guna memperbaiki ekonomi Amerika Serikat.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku orang-orang yang dapat diamati. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, dll.

Penelitian ini disusun menggunakan penelusuran pustaka/literatur terkait topik maupun data dari penelitian serupa sebelumnya. Data yang diperoleh berasal dari buku, situs internet, koran elektronik, serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan hubungan kerja sama Amerika Serikat dan Arab Saudi. Data yang didapatkan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

G. Jangkauan Penelitian

Penulis menekankan penggunaan batasan waktu dalam skripsi ini. Jangka waktu yang diambil yaitu dari tahun 2017 sampai tahun 2020, akan tetapi tidak menutup kemungkinan penulis menggunakan data rujukan di luar waktu tersebut jika dianggap masih relevan dengan topik penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah penulis, sistematika penulisan dalam skripsi ini akan dibagi ke dalam empat bab dengan urutan sebagai berikut:

BAB I berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II berisi penjelasan mengenai sejarah hubungan kerja sama Amerika Serikat dan Arab Saudi. Bab ini juga akan

menjelaskan dinamika yang terjadi dalam hubungan kerja sama yang terjalin antara kedua negara.

BAB III berisi penjelasan mengenai kondisi ekonomi Amerika Serikat pada masa kepemimpinan Trump. Bab ini juga akan berisi jawaban atas rumusan masalah yakni alasan mengapa Amerika Serikat melakukan kerja sama dengan Arab Saudi dalam bidang keamanan pada era Trump.

BAB IV berisi penutup dan kesimpulan dari pembahasan bab-bab yang telah dijelaskan sebelumnya.